



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0004/XII/IL/DPM-PPTSP/2017**

**T E N T A N G**  
**IZIN LINGKUNGAN**  
**PERUMAHAN**

**A.N. ODIYANTA SITEPU, ST (Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Sakarnas)**

- Menimbang : a. bahwa penanggung jawab Izin Lingkungan PERUMAHAN berdasarkan tanda terima berkas pendaftaran Nomor 38/PTS/XI/2017 tanggal 17 November 2017 perihal permohonan Izin Lingkungan PEMECAH BATU (STONE CRUSHER) A.N ODIYANTA SITEPU, ST (Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Sakarnas) di Desa Bandar Tongging Kec. Merek Kab. Karo Prov. Sumatera Utara yang merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Nomor 050/2471/DLH/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Rekomendasi Atas Izin Lingkungan DPLH Kegiatan Pemecah Batu (Stone Crusher) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Lingkungan kegiatan PEMECAH BATU (STONE CRUSHER) A.N. ODIYANTA SITEPU, ST (Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Sakarnas).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo
5. Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayana Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).
- Memperhatikan : 1. Pengumuman Nomor 4134/DPM-PPTSP/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Permohonan Izin Lingkungan kegiatan PEMECAH BATU (STONE CRUSHER) A.N. ODIYANTA SITEPU, ST (Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Sakarnas);
2. Berdasarkan Surat Perintah Tinjau Lapangan Nomor 4147/DPM\_PPTSP/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Permohonan Izin Lingkungan kegiatan PEMECAH BATU (STONE CRUSHER) A.N. ODIYANTA SITEPU, ST (Bertindak Untuk dan Atas Nama PT. Sakarnas).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :  
1. Nama Perusahaan : PERUMAHAN  
2. Bidang Usaha : null  
3. Penanggung Jawab : ODIYANTA SITEPU, ST  
4. Alamat : JALAN LETNAN RATA PERANGIN- ANGIN GANG 10 NO 5  
5. Lokasi Kegiatan : Desa Bandar Tongging Kec. Merek Kab. Karo Prov. Sumatera Utara  
KEDUA : Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi : Lahan seluas 19.950 m2 m2.  
KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.  
KEEMPAT : Pengawasan terhadap Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.  
KELIMA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan.  
KEENAM : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan apabila Pemegang Izin telah mengakhiri usaha dan/ atau kegiatannya, atau pemrakarsa melakukan perubahan usaha dan/ atau kegiatannya.  
KETUJUH : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:  
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;  
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;  
3. Bupati Karo up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;  
4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera.  
KEDELAPAN : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, tidak memenuhi komitmen pada surat pernyataan yang telah disepakati bersama serta melanggar peraturan Perundang-undang yang berlaku.  
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 08 Desember 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO

ALMINA BANGUN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600214 198811 2 002



- Tembusan :  
1. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta  
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan  
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo di Kabanjahe